

ABSTRAK

Theresia Chandra (01656190058)

TINJAUAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) SAHAM YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI SAHAM

(xi + 103 halaman)

Kata kunci: Kepemilikan Silang, Akta Jual Beli Saham, Notaris

UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menjelaskan bahwa pendirian suatu PT harus didirikan oleh minimal dua orang yang memiliki saham dengan dibuatkannya Akta Autentik. Bukti kepemilikan pemegang saham dalam suatu PT adalah saham, dimana akan dilakukan penyeteroran penuh modal yang menjadi bagian oleh pemegang saham dalam PT. Saham dapat diperjualbelikan oleh pemegang saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT, dimana saham sebagai benda bergerak dapat beralih dengan dibuatkannya Akta Autentik. Terjadinya pengeluaran saham adalah suatu upaya untuk pengumpulan modal dan PT tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri. Bilamana suatu PT yang melanggar ketentuan mengenai syarat pengeluaran saham sebagaimana disebutkan di atas ini, maka dapat terjadi kepemilikan silang atas saham atau *Cross Holding*. Namun pada kenyataannya, kasus *Cross Holding* masih terjadi di Indonesia. Apabila peralihan hak atas saham terjadi dimana tidak bertujuan untuk pengumpulan modal dan PT tersebut mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri, maka suatu PT telah melanggar ketentuan Pasal 36 UUPT tentang *Cross holding*. Dalam hal ini, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai *Cross Holding* dengan studi kasus dimana *Cross Holding* tersebut mengakibatkan pembatalan atas Akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penelitian ini, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan tentang *Cross Holding* dalam UUPT dan peran Notaris terhadap pembuatan Akta Jual Beli Saham dengan metode penelitian hukum secara yuridis normatif.

ABSTRACT

Theresia Chandra (01656190058)

TINJAUAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) SAHAM YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI SAHAM

(xi + 103 pages)

Key Notes: Cross Holding, Deed of Sale and Purchase of Shares, Notary

Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”) explains that the establishment of a Limited Liability Company must be established by a minimum of two people who own shares by making an Authentic Deed. Proof of shareholder ownership in a PT is shares, which will be made a full deposit of capital which is part of the shareholders in the PT. Shares can be traded by shareholders with the terms and conditions as stipulated in the Company Law, where shares as movable objects can be transferred by making an Authentic Deed. The issuance of shares is an effort to raise capital and the PT may not issue shares for its own ownership. If a PT violates the provisions regarding the terms of issuance of shares as mentioned above, cross-ownership of shares or crossholding may occur. But in reality, crossholding cases still occur in Indonesia. If the transfer of rights to shares occurs where it is not intended to raise capital and the PT issues shares for its own ownership, then a PT has violated the provisions of Article 36 of the Company Law concerning Cross Holding. In this thesis, the Author is interested in researching Cross Holding with a case study where the Cross Holding resulted in the cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Shares made before a Notary. In this thesis, the Author will explain about the regulation of Cross Holding in the Company Law and the role of the Notary in making the Deed of Sale and Purchase of Shares with a normative juridical research method.